



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pelayanan kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. RSUP Provinsi NTB mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas RSU Provinsi NTB:

Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang di laksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan, dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Umum Provinsi Kelas B Pendidikan.

b. Fungsi RSUP Provinsi NTB

1. Melaksanakan pelayanan pencegahan, pemulihan kesehatan;
2. Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat;
3. Melaksanakan upaya rujukan (system referral);
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan;
5. Pengkoordinasian dan pembinaan rumah sakit;
6. Pengendalian evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepegawaian

Salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang akan menggerakkan dan melaksanakan tugas organisasi. Jumlah Pegawai RSUP Provinsi NTB pada awal tahun 2011 adalah 881 orang, dan sepanjang tahun 2011 terjadi penambahan dan pengurangan karena memasuki usia pensiun sebanyak 8 orang serta meninggal dunia sebanyak 2



orang, sehingga pada bulan Desember 2011 berjumlah 865 orang yang terdistribusi sebagai berikut :

a. DISTRIBUSI SDM RSUP PROVINSI NTB MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN

yaitu :

- 1) Pegawai Negeri Sipil / PNS : 862 Orang
- 2) Pegawai Tidak Tetap (Honda) : 8 Orang
- 3) PTT Pusat (Dokter) : Orang

b. DISTRIBUSI PEGAWAI RSUP PROVINSI NTB BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	STATUS KEPEGAWAIN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	P N S	372	490	865
2	P T T (DAERAH)	5	3	8
3	P T T (PUSAT)			
J U M L A H		377	493	870

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUP NTB

Bila dilihat dari jenis kelamin SDM RSUP Provinsi NTB, ternyata jumlah SDM perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki, yaitu laki-laki 43,33% dan perempuan 56,66%

c. DISTRIBUSI PNS MENURUT JENIS JABATAN :

Pegawai RSUP Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas sehari-hari berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan jabatan/kompetensi masing-masing. Jenis jabatan yang ada di RSUP Provinsi NTB, yaitu jabatan struktural (eselon), jabatan non struktural umum (administrasi) dan jabatan non struktural khusus (fungsional), dengan distribusi sebagai berikut :

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH (ORG)
1	Struktural	26
2	Non Struktural	
	a. Non Struktural Umum	317
	b. non Struktural Khusus/ Fungsional	519
J U M L A H		862

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUP NTB

Dari data diatas ternyata 60,20% pegawai RSUP Provinsi NTB merupakan Pejabat Fungsional. Jenis Jabatan Fungsional sesuai Surat Keputusan Men-PAN, Keputusan Menteri Kesehatan dan Kepala BKN di RSUP Provinsi NTB tahun 2011 ada 22 jenis jabatan fungsional (Jafung), yaitu :

- 1) Jabatan Fungsional Dokter
- 2) Jabatan Fungsional Perawat Ahli
- 3) Jabatan Fungsional Perawat Terampil



- 4) Jabatan Fungsional Perawat Gigi
- 5) Jabatan Fungsional Bidan
- 6) Jabatan Fungsional Apoteker Ahli
- 7) Jabatan Fungsional Apoteker Terampil
- 8) Jabatan Fungsional Asisten Apoteker
- 9) Jabatan Fungsional Perkam Medis
- 10) Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
- 11) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Ahli
- 12) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Terampil
- 13) Jabatan Fungsional Radiografer
- 14) Jabatan Fungsional Terapis Wicara
- 15) Jabatan Fungsional Refraksionis
- 16) Jabatan Fungsional Fisioterapis
- 17) Jabatan Fungsional Nutritionis Ahli
- 18) Jabatan Fungsional Nutritionis Terampil
- 19) Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli
- 20) Jabatan Fungsional Sanitarian Terampil
- 21) Jabatan Fungsional Perencana
- 22) Jabatan Fungsional Umum

Dua puluh dua jenis Jafung tersebut masing-masing memiliki strata yang berbeda-beda.

DISTRIBUSI SDM FUNGSIONAL , terdiri dari :

- | | | |
|------------------------------|---|-----------|
| 1) Dokter Spesialis | : | 41 orang |
| 2) Dokter Umum | : | 56 orang |
| 3) Dokter Gigi | : | 5 orang |
| 4) Para Medis keperawatan | : | 381 orang |
| 5) Paramedis non keperawatan | : | 379 orang |

Rincian Dokter Spesialis yang ada di RSUD Mataram :

- | | |
|---|-----------|
| (a) Dokter Spesialis Bedah | = 4 orang |
| (b) Dokter Spesialis Penyakit Dalam | = 4 orang |
| (c) Dokter Spesialis Anak | = 6 orang |
| (d) Dokter Spesialis Obgyn | = 7 orang |
| (e) Dokter Spesialis Radiologi | = 2 orang |
| (f) Dokter Spesialis Anastesi | = 2 orang |
| (g) Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah | = orang |
| (h) Dokter Spesialis Mata | = 2 orang |
| (i) Dokter Spesialis THT | = 2 orang |
| (j) Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin | = 2 orang |
| (k) Dokter Spesialis Paru | = 2 orang |
| (l) Dokter Spesialis Syaraf | = 2 orang |



(m)Dokter Spesialis Orthopedi	= 1 orang
(n) Dokter Spesialis Urologi	= 1 orang
(o) Bedah Mulut	= 1 orang
(p) Dokter Spesialis Konservasi	= 1 orang
(q) Dokter Spesialis Emergency	= 1 orang
(r) Dokter Spesialis Pathologi Klinik	= 1 orang

d. DISTRIBUSI PNS MENURUT GOLONGAN KEPANGKATAN

Beban tugas, tanggung jawab, pendapatan, dan lain-lain karyawan RSUP Provinsi NTB khususnya PNS yang dilaksanakan/diterima oleh masing-masing pegawai antara lain berdasarkan Golongan Kepangkatan terdiri dari : PNS Golongan I (2,61%) PNS RSUP Provinsi NTB golongan II (35,45%), golongan III (55,27%) dan golongan IV (6,69%).

Distribusi PNS menurut golongan kepangkatan adalah sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	70
	D	6
	C	14
	B	15
	A	35
2	III	521
	D	126
	C	101
	B	132
	A	159
3	II	255
	D	49
	C	84
	B	42
	A	80
4	I	19
	D	2
	C	13
	B	1
	A	3
J U M L A H		862

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUP NTB

e. DISTRIBUSI SDM PNS RSUP PROVINSI NTB BERDASARKAN KUALIFIKASI DAN JENIS /TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR

Karyawan RSUP Provinsi NTB (khususnya PNS) mempunyai kualifikasi/tingkat pendidikan yang sangat beragam mulai dari tingkat pendidikan terendah yaitu



SD (0,81%), SLTP (2,32%), SLTA (23,82%), D1 & D2 (1,62%), D3 (37,11%), D4 (3,01%), S1 (24,74%) dan S2 (6,59%). Tingkat pendidikan dengan jumlah terbanyak di RSUD Provinsi NTB adalah tingkat pendidikan D3 (37,11%) dan S1 (24,74%) terutama dalam bidang kesehatan. Distribusi karyawan (PNS) RSUD Provinsi NTB berdasarkan tingkat pendidikan secara rinci sebagai berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL
		KESEHATAN	NON KESEHATAN	
1	Spesialis	41		41
	S2	9	7	16
2	S1	177	37	214
3	D4	26	0	26
4	D3	305	15	320
5	D1 dan D2	13	1	14
6	SLTA / Sederajat	44	160	204
7	SLTP / Sederajat		20	20
8	SD / Sederajat		7	7
JUMLAH		617	248	862

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD NTB

f. DISTRIBUSI SDM PTT RSUD PROVINSI NTB BERDASARKAN KUALIFIKASI DAN JENIS/TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S2	-
2	S1	2
3	D4	-
4	D3	1
5	D1 dan D2	-
6	SLTA / Sederajat	-
7	SLTP / Sederajat	-
8	SD / Sederajat	5
JUMLAH		8

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD NTB

Susunan Organisasi RSUD Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Subbagian Humas dan Masyarakat.



2. Bagian Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga;
 - c) Subbagian Monev dan Pelaporan.
3. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Penyusunan Anggaran;
 - b) Subbagian Mobilisasi Dana;
 - c) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
- c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
 1. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Medis;
 - b) Seksi Pelayanan Penunjang Medis.
 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - b) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan.
- d. Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari:
 1. Bidang Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari:
 - a) Seksi Pendidikan;
 - b) Seksi Pelatihan.
 2. Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Penelitian;
 - b) Seksi Pengembangan Teknologi Kesehatan.
- e. Instalasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Satuan Pemeriksaan Interen
- h. Komite Medis
- i. Komite Etik dan Hukum
- j. Komite Keperawatan
- k. Instalasi-instalasi:
 - 1) Instalasi Promosi Kesehatan RS dan Kehumasan
 - 2) Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit
 - 3) Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu
 - 4) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
 - 5) Instalasi Rekam Medik
 - 6) Instalasi Kesehatan Lingkungan
 - 7) Instalasi Bedah Sentral
 - 8) Instalasi Rawat Darurat
 - 9) Instalasi Rawat Intensif
 - 10) Instalasi Rawat Inap



- 11) Instalasi Rawat Jalan
- 12) Instalasi Anastesi
- 13) Instalasi Rehabilitasi Medis
- 14) Instalasi Gizi
- 15) Instalasi Farmasi
- 16) Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenazah
- 17) Instalasi Pelayanan darah
- 18) Instalasi Radiologi
- 19) Instalasi Patologi Anatomi
- 20) Instalasi Laboratorium
- 21) Instalasi Diklat
- 22) Instalasi Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kesehatan

I. Staf Medik Fungsional

- 1) SMF Anak
- 2) SMF Bedah
- 3) SMF Obgyne
- 4) SMF Gigi dan Mulut
- 5) SMF Mata
- 6) SMF Kulit Kelamin
- 7) SMF THT
- 8) SMF Bedah Tulang
- 9) SMF Jantung
- 10) SMF Paru
- 11) SMF Syaraf
- 12) SMF Umum
- 13) SMF Penyakit Dalam

m. Dewan Penyantun

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)* kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2009 – 2013, Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Tahun 2011 berdasarkan pada indikator (*inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Provinsi NTB yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2011.

b. Tujuan

- a. Menyediakan dan meningkatkan kapasitas SDM sesuai standat Rumah sakit Kelas A.
- b. Meningkatkan kualitas pelanggan baik eksternal maupun internal.
- c. Meningkatkan pelayanan yang efisien dan efektif.
- d. Meningkatkan sumber daya Rumah Sakit sesuai standar kelas A.
- e. Mewujudkan pengelolaan sumber daya Rumah Sakit secara transparan dan akuntabel.



- f. Memperluas jangkauan pelayanan spesialistik dan subspesialistik kepada masyarakat.
- g. Mendapatkan pengakuan sebagai Rumah Sakit pendidikan dan penelitian utama berstandar nasional.
- h. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan Rumah Sakit.

2. Faktor Kunci keberhasilan

Adapun factor-faktor kunci keberhasilan RSUP Provinsi NTB dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memperbaiki manajemen sumber daya manusia.
- b. Peningkatan manajemen mutu.
- c. Mempercepat realisasi rumah sakit menjadi type A.
- d. Meningkatkan mutu SIM – RS.
- e. Meningkatkan dan menambah jenis pelayanan baru.
- f. Mengoptimalkan pendapatan fungsional.



BAB II PERENCANAAN STRATEGIK

A. PERNYATAAN VISI DAN MISI

1. VISI

Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang unggul dalam pelayanan pendidikan dan Penelitian di Indonesia Timur Tahun 2013

2. MISI

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang unggul dan berkualitas secara profesional, selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan.
- b. Mengembangkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam program pembangunan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sistem Kesehatan Nasional.
- c. Menyiapkan sumberdaya yang unggul untuk menunjang pelaksanaan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan.
- d. Mengembangkan sistem manajemen dan Administrasi Rumah Sakit untuk menunjang pelayanan.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis RSUP Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Administrasi pelayanan Rumah Sakit, dengan sasaran:
 - 1) Tersedianya layanan surat menyurat
 - 2) Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - 3) Tersedianya jasa administrasi keuangan
 - 4) Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
 - 5) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
 - 6) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
 - 7) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 8) Tersedianya makanan dan minuman
 - 9) Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 10) Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran



- 11) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - 12) Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik
 - 13) Tersedianya tabung pemadam kebakaran yang telah terisi
 - 14) Tersedianya kebutuhan gas LPG
- b. Meningkatkan Kelancaran Operasional Rumah Sakit, dengan sasaran:
- 1) Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- c. Meningkatkan sumber daya aparatur Rumah Sakit dengan sasaran:
- 1) Tersedianya tenaga terampil sesuai kompetensi
 - 2) Tersedianya fasilitas
 - 3) Tersedianya fasilitas
- d. Meningkatkan sistem pelaporan dan capaian kinerja Rumah Sakit dengan sasaran :
- 1) Tersedianya dokumen LAKIP dan Laporan Tahunan
 - 2) Tersedianya dokumen keuangan semesteran
 - 3) Tersedianya dokumen keuangan
 - 4) Tersedianya dokumen DPA
 - 5) Tersedianya dokumen Rencana Kerja
- e. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran:
- 1) Terlayaninya pasien dengan baik
- f. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit:
- 1) Terbangunnya gedung rumah sakit Dasan Cermen
 - 2) Tersedianya alat kedokteran dan alat-alat kesehatan Rumah Sakit
 - 3) Tersedianya obat-obatan dan gas medik
 - 4) Tersedianya perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit
 - 5) Tersedianya barang/blanko cetak administrasi pelayanan
- g. Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit
- 1) Terpeliharanya gedung dan peralatan Rumah Sakit
 - 2) Terpeliharanya alat-alat kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit
 - 3) Terpeliharanyaperengkapan Rumah Sakit
- h. Kemitraan dan peningkatan pelayanan kesehatan
1. Tersedianya dokumen perjanjian kerjasama

4. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja RSUP Provinsi NTB dikembangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan.



a. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan – tindakan tertentu yang mengatur suatu tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran. Menetapkan suatu kebijakan berarti mengarahkan kepada kondisi dimana setiap pejabat dan pelaksana pada suatu organisasi, mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja atau tidak dan bagaimana mengimplementasikannya.

Kebijakan yang ditetapkan oleh RSUD Provinsi NTB sesuai dengan Renstra Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai Perda Nomor 1 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan penyediaan SDM yang professional dan kompeten sesuai standart Rumah Sakit Kelas A.
2. Pengembangan pelayanan berorientasi pada kepuasan pelanggan.
3. Pengembangan akses informasi dan kepastian pelayanan.
4. Penerapan manajemen mutu di setiap jajaran.
5. Pemenuhan kebutuhan sumber daya sesuai standar Rumah Sakit Kelas A
6. Menyiapkan sarana SIM-RS
7. Penciptaan suasana kondusif untuk pengembangan pelayanan.
8. Pengembangan jejaring pendidikan dan penelitian.
9. Pengembangan perencanaan pengelolaan keuangan strategis Rumah sakit.
10. Pengembangan sistem akuntansi keuangan dari manual menjadi komputerais.
11. Pengembangan sistem analisa biaya.

b. PROGRAM

Program Kerja Operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Program Kerja Operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program-program yang ditetapkan oleh RSUD Provinsi NTB sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai Perda Nomor 1 tahun 2009.

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3) Peningkatan disiplin pegawai



- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Upaya Kesehatan Masyarakat
- 7) Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
- 8) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- 9) Penyusunan Perumusan naskah perjanjian kerjasama

c. KEGIATAN

Aktifitas adalah kegiatan organisasi yang merupakan penjabaran kebijaksanaan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Perhatian utama dari suatu aktifitas akan terlihat pada tugas pokok dan fungsi, program kerja yang menjadi isu nasional, serta aktifitas dominan dan vital bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi.

Aktifitas merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah dalam merealisasikan program kerjanya. Aktifitas merupakan cerminan dari strategi konkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Kegiatan yang ditetapkan oleh RSUP Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 4) Penyediaan alat tulis kantor
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 6) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 8) Penyediaan makanan dan minuman
- 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- 10) Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
- 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
- 12) Penyediaan alat listrik dan Elektronik
- 13) Penyediaan jasa pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
- 14) Penyediaan jasa pengisian Tabung Gas
- 15) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
- 16) Pendidikan dan pelatihan formal
- 17) Pembinaan mental dan fisik aparatur
- 18) Peningkatan iman dan takwa aparatur
- 19) Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 20) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- 21) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



- 22) Penyusunan RKA dan DPA
- 23) Penyusunan RKPD/Renja SKPD
- 24) Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- 25) Pembangunan Rumah Sakit
- 26) Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat Rumah Sakit
- 27) Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit
- 28) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit
- 29) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit.
- 30) Pernyusunan perumusan naskah perjanjian kerjasama

B. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai Perda Nomor 1 tahun 2009. Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dalam hal ini adalah kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2011, disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;
2. Indikator kinerja sasaran dan target capaiannya;
3. Program;
4. Kegiatan; Indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya.

Rencana Kerja Tahunan (Formulir RKT) telah tercakup didalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada tahap rencana. Indikator sasaran yang akan dicapai RSU Provinsi NTB selama tahun 2011 secara rinci disajikan dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada tahap rencana sebagaimana terlampir.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi Kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Rumah Sakit Umum Provinsi NTB sebagai Rumah Sakit Umum Rujukan satu-satunya di Provinsi NTB melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraruean Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2011.

a. Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Rumah Sakit Umum Provinsi NTB diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Outcome, Benefit*, dan *Impact*. Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- **Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)**
- **Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)**



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

➤ Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

➤ Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

➤ Indikator Kinerja Kegiatan

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.



b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Secara umum Rumah Sakit Umum Provinsi NTB telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Tahun 2009-2013. Tiga puluh sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Tahun 2009-2013. Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2011

1	Kegiatan	Penyediaan jasa surat menyurat			
-	Masukan	Target	Rp. 92.432.000	100,00%	
		Realisasi	Rp. 88.778.616	96,03%	
-	Keluaran	Tersedianya bahan surat menyurat			
-	Hasil	Meningkatkan pelayanan surat-menyurat			
-	Dampak	Meningkatkan pelayanan surat-menyurat			
2	Kegiatan	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik			
-	Masukan	Target	Rp. 1.500.000.000	100,00%	
		Realisasi	Rp. 1.374.692.527	91,65%	
-	Keluaran	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
-	Hasil	Untuk kelancaran proses pelayanan			
-	Dampak	Meningkatkan pelayanan			
3	Kegiatan	Penyediaan jasa administrasi keuangan			
-	Masukan	Target	Rp. 159.885.000	100,00%	
		Realisasi	Rp. 112.917.000	70,62%	
-	Keluaran	Tersedianya aplikasi gaji			
-	Hasil	Untuk kelancaran pembayaran gaji pegawai			
-	Dampak	Meningkatkan kinerja pegawai			
4	Hasil	Penyediaan alat tulis kantor			
-	Dampak	Target	Rp. 159.298.025	100,00%	
		Realisasi	Rp. 159.252.975	99,97 %	
-	Keluaran	Tersedianya alat tulis kantor Rumah Sakit			
-	Hasil	Untuk kelancaran proses pelayanan			
-	Dampak	Meningkatkan pelayanan			
5	Kegiatan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			
-	Masukan	Target	Rp. 75.000.000	100,00%	
		Realisasi	Rp. 72.996.800	97,33%	
-	Keluaran	Terlayannya kebutuhan barang cetakan dan Peggandaan			
-	Hasil	Memudahkan proses pelayanan			
-	Dampak	Terwujudnya dokumentasi yang lebih baik			
6	Kegiatan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			
-	Masukan	Target	Rp. 297.890.000	100,00%	
		Realisasi	Rp. 125,844,000	42,25%	



- Keluaran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
- Hasil	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- Dampak	Peningkatan pelayanan
7 Kegiatan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan
- Masukan	Target Rp. 15.460.000 100,00%
	Realisasi Rp. 10,840,000 70,12%
- Keluaran	Terlayannya kebutuhan informasi
- Hasil	Adanya informasi
- Dampak	Tersebaranya Informasi tentang RSU
8 Kegiatan	Penyediaan makanan dan minuman
- Masukan	Target Rp. 319.143.500 100,00%
	Realisasi Rp. 273.666.759 85,75%
- Keluaran	Penyediaan makanan dan minuman rapat, tamu & petugas khusus.
- Hasil	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu & petugas khusus.
- Dampak	Kesehatan dan daya tahan tubuh petugas kuat
9 Kegiatan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Masukan	Target Rp. 388.000.000 100,00%
	Realisasi Rp. 352.464.000 90,84%
- Keluaran	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat dan konsultasi ke luar daerah
- Hasil	Memudahkan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Dampak	Terselenggaranya pelayanan RS yang lebih Baik
10 Kegiatan	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
- Masukan	Target Rp. 1.306.627.375 100,00%
	Realisasi Rp. 1.163.340.500 89,03%
- Keluaran	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran yang dibayar
- Hasil	Untuk kelancaran proses pelayanan
- Dampak	Meningkatnya pelayanan
11 Kegiatan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- Masukan	Target Rp. 220.000.000 100,00%
	Realisasi Rp. 208,433,500 94,74%
- Keluaran	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat dan konsultasi didalam daerah dan pelayanan ambulance maskin dan umum
- Hasil	Memudahkan koordinasi dan konsultasi didalam daerah dan pelayanan maskin
- Dampak	Terselenggaranya pelayanan Rumah Sakit yang lebih baik
12 Kegiatan	Penyediaan alat listrik dan elektronik
- Masukan	Target Rp. 66.595.000 100,00%
	Realisasi Rp. 61,587,500 92,48%
- Keluaran	Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik
- Hasil	Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik Rumah Sakit
- Dampak	Peningkatan pelayanan
13 Kegiatan	Penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran
- Masukan	Target Rp. 11.219.000 100,00%
	Realisasi Rp. 0 0,00%
- Keluaran	Terlayannya kebutuhan pengisian tabung pemadam kebakaran



- Hasil sebanyak 43 tabung
 - Dampak Terlayannya kebutuhan pengisian tabung pemadam kebakaran
- 14 Kegiatan Meningkatkan keamanan pelayanan Rumah Sakit
- 14 Kegiatan Penyediaan jasa pengisian tabung gas
- Masukan Target Rp. 106.811.000 100,00%
 - Realisasi Rp. 61,467,000 57,55%
 - Keluaran Kesediaan tabung gas LPG yang telah terisi sebanyak 396 tabung
 - Hasil Terlayannya kebutuhan tabung gas LPG
 - Dampak Peningkatan pelayanan

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Masukan Target Rp. 242.500.000 100,00%
 - Realisasi Rp. 211.743.710 87,32%
 - Keluaran Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2
 - Hasil Terpeliharanya kendaraan bermotor
 - Dampak Peningkatan pelayanan

Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- 1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Masukan Target Rp. 261.782.500 100,00%
 - Realisasi Rp. 177.350.000 67,75%
 - Keluaran Terlatihnya aparatur Rumah Sakit
 - Hasil Meningkatnya kualitas SDM RS/aparatur yang berkompetensi
 - Dampak Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- 2 Kegiatan Pembinaan mental dan fisik aparatur
- Masukan Target Rp. 7.500.000 100,00%
 - Realisasi Rp. 4.400.000 58,67%
 - Keluaran Tersedianya fasilitas
 - Hasil Terjaganya kesehatan
 - Dampak Meningkatnya pelayanan
- 3 Kegiatan Peningkatan iman dan taqwa aparatur
- Masukan Target Rp. 2.400.000 100,00%
 - Realisasi Rp. 1.200.000 50,00%
 - Keluaran Tersedianya fasilitas
 - Hasil Meningkatnya iman dan taqwa aparatur
 - Dampak Meningkatnya pelayanan



Program : Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1	Kegiatan	Penyusun laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		
-	Masukan	Target	Rp. 38.556.500	100,00%
		Realisasi	Rp. 34.594.700	89,72%
-	Keluaran	Tersedianya dokumen LAKIP dan Laporan Tahunan		
-	Hasil	Tersedianya informasi tentang laporan kinerja RS		
-	Dampak	Terselenggaranya pelayanan yang lebih baik		
2	Kegiatan	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		
-	Masukan	Target	Rp. 5.506.200	100,00%
		Realisasi	Rp. 5.506.200	100,00%
-	Keluaran	Tersedianya dokumen keuangan semesteran		
-	Hasil	Tersedianya informasi keuangan semesteran		
-	Dampak	Tersedianya pelayanan yang lebih baik		
3	Kegiatan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		
-	Masukan	Target	Rp. 97.391.700	100,00%
		Realisasi	Rp. 94,387,200	96,92%
-	Keluaran	Tersedianya dokumen keuangan		
-	Hasil	Tersedianyanya dokumen keuangan RS		
-	Dampak	Terselenggaranya pelayanan yang lebih baik		
4	Kegiatan	Penyusunan RKA dan DPA		
	Masukan	Target	Rp. 24.000.000	100,00%
		Realisasi	Rp. 12.000.000	50,00%
	Keluaran	Tersedianya dokumen Rencana Kerja		
	Hasil	Tersedianya infomrasi tentang rencana kerja RS		
	Dampak	Terselenggaranya pelayanan yang lebih baik		
5	Kegiatan	Penyusunan RKPD/Renja SKPD		
-	Masukan	Target	Rp. 11.405.000	100,00%
		Realisasi	Rp. 10.374.500	90,96%
-	Keluaran	Tersedianya dokumen Rencana Kerja		
-	Hasil	Tersedianya informasi tentang rencana kerja RS		
-	Dampak	Meningkatkan pelayanan yang lebih baik		

Program : Upaya Kesehatan Masyarakat

1	Kegiatan	Peningkatan Kesehatan Masyarakat		
-	Masukan	Target	Rp. 34.504.760.325	100,00%
		Realisasi	Rp. 33.752.992.400,27	97,82%
-	Keluaran	Terlayaninya pasien dengan baik		
-	Hasil	Pelayanan berjalan dengan lancar		
-	Dampak	Meningkatkan kinerja pelayanan RS		



Program : Pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata

1	Kegiatan	Pembangunan Rumah Sakit		
-	Masukan	Target	Rp. 40.323.001.625	100,00%
		Realisasi	Rp. 39.265.811.200	97,38%
-	Keluaran	Tersedianya gedung Kesehatan		
-	Hasil	Peningkatan sarana pelayanan kesehatan		
-	Dampak	Terlayannya Pasien dengan baik		
2	Kegiatan	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat RS		
-	Masukan	Target	Rp. 25.750.000	100,00%
		Realisasi	Rp. 17.212.500	66,84%
-	Keluaran	Tersedianya barang/blangko cetak administrasi pelayanan		
-	Hasil	Memudahkan proses pelayanan		
-	Dampak	Meningkatnya kualitas pelayanan RS		

Program : Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1	Kegiatan	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		
-	Masukan	Target	Rp. 1.268.540.250	100,00%
		Realisasi	Rp. 1.153.690.905	90,95%
-	Keluaran	Terpeliharanya gedung rumah sakit		
-	Hasil	Terjaganya kebersihan gedung dan alat yang memenuhi standar		
-	Dampak	Performance rumah sakit semakin baik		
2	Kegiatan	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit		
-	Masukan	Target	Rp. 140.250.000	100,00%
		Realisasi	Rp. 79.980.500	57,03%
-	Keluaran	Terpeliharanya alat kesehatan/kedokteran rumah sakit		
-	Hasil	Tersedianya alat-alat kesehatan yang memenuhi standar		
-	Dampak	Terselenggaranya pelayanan yang lebih baik		
3	Kegiatan	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit		
-	Masukan	Target	Rp. 244.500.000	100,00%
		Realisasi	Rp. 78.705.000	32,19%
-	Keluaran	Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit		
-	Hasil	Tersedianya perlengkapan yang memenuhi standar		
-	Dampak	Terselenggaranya pelayanan yang lebih baik		

Program : Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1	Kegiatan	Penyusunan Perumusan naskah Perjanjian Kerjasama		
-	Masukan	Target	Rp. 27.780.000	100,00%
		Realisasi	Rp. 24.000.000	86,39%
-	Keluaran	Tersedianya dokumen naskah kerjasama		
-	Hasil	Tersedianya dokumen Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		
-	Dampak	Meningkatnya pelayanan yang lebih baik		



II. EVALUASI KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dengan bantuan instrumen Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) maka dalam tahapan evaluasi kinerja ini digunakan alat bantu formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan keterkaitan antara Sasaran dengan Program Kegiatan melalui indikator kinerja yang meliputi:

1. Sasaran : Tersedianya bahan surat-menyurat
Indikator : Tersedianya kebutuhan 3 jenis Benda Pos (Perangko, meterai, box Amplop) dan jumlah pengiriman
Target : 3 Jenis
Realisasi : 3 Jenis
2. Sasaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Target : 100%
Realisasi : 91,65%
3. Sasaran : Terlayannya pembayaran gaji secara cepat dan tepat
Indikator : Tersedianya aplikasi Gaji
Target : 100%
Realisasi : 99,97%
4. Sasaran : Tersedianya alat tulis kantor RS
Indikator : Tersedianya alat tulis kantor yang memadai
Target : 31 jenis
Realisasi : 31 jenis
5. Sasaran : Meningkatnya kualitas dokumen
Indikator : Terlayannya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Target : 100%
Realisasi : 97,33%
6. Sasaran : Penunjang Pelayanan kesehatan
Indikator : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Target : 17 jenis
Realisasi : 17 jenis
7. Sasaran : Terlayannya kebutuhan informasi
Indikator : Bertambahnya pengetahuan dan wawasan
Target : 2 Jenis
Realisasi : 2 Jenis
8. Sasaran : Penyediaan makanan dan minuman rapat, tamu & petugas khusus
Indikator : Peningkatan daya tahan tubuh bagi karyawan
Target : 100 %
Realisasi : 85,75 %
9. Sasaran : Memudahkan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Indikator : tercapainya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Target : 98 OT
Realisasi : 98 OT
10. Sasaran : Terbayarnya honor tenaga administrasi dan teknis perkantoran



	Indikator	:	Terbayarnya jasa tenaga pendukung teknis/administrasi
	Target	:	100%
	Realisasi	:	100 %
11.	Sasaran	:	Memudahkan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
	Indikator	:	Terlayani kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
	Target	:	1 tahun
	Realisasi	:	1 taun
12.	Sasaran	:	Terselenggaranya pelayanan yang lebih baik
	Indikator	:	Tersedianya kebutuhan Alat-alat listrik dan elektronik
	Target	:	22 Jenis
	Realisasi	:	22 Jenis
13.	Sasaran	:	Meningkatnya keamanan pelayanan rumah sakit
	Indikator	:	Terlayanainya pengisian tabung pemadam kebakaran
	Target	:	43 tabung
	Realisasi	:	0 tabung
14.	Sasaran	:	Terselenggaranya pelayanan instalasi gizi yang lebih baik
	Indikator	:	Tersedianya kebutuhan Gas LPG
	Target	:	396 tabung
	Realisasi	:	396 tabung
15.	Sasaran	:	Memudahkan pelayanan rumah sakit
	Indikator	:	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
	Target	:	35 Unit
	Realisasi	:	35 Unit
16.	Sasaran	:	Meningkatnya kualitas SDM RS/aparatur yang berkopetensi
	Indikator	:	Terlatihnya aparatur RS
	Target	:	100%
	Realisasi	:	67,75 %
17.	Sasaran	:	Meningkatkan performance pegawai
	Indikator	:	Tersedianya fasilitas
	Target	:	100%
	Realisasi	:	100%
18.	Sasaran	:	Meningkatkan keimanan
	Indikator	:	Tersedianya fasilitas
	Target	:	100%
	Realisasi	:	50,00%
19.	Sasaran	:	Tersedianya dokumen Lakip dan Laporan tahunan
	Indikator	:	Tersedianya bahan evaluasi kinerja dan perencanaan
	Target	:	2 dokumen
	Realisasi	:	2 dokumen
20.	Sasaran	:	Tersedianya bahan evaluasi keuangan
	Indikator	:	Tersedianya dokumen keuangan semesteran
	Target	:	100%
	Realisasi	:	100%



21. Sasaran : Meningkatnya jumlah orang yang sehat
Indikator : Terpenuhinya pelayanan terhadap kesehatan masyarakat
Target : 100 %
Realisasi : 100%
- 22 Sasaran : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Indikator : Tersedianya evaluasi keuangan
Target : 100%
Realisasi : 89,72%
- 23 Sasaran : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Indikator : Tersedianya bahan perencanaan dan penganggaran
Target : 1 dok
Realisasi : 1 dok
- 24 Sasaran : Menurunnya angka kesakitan masyarakat
Indikator : Terlayannya pasien dengan baik
Target : 100%
Realisasi : 97,82%
- 25 Sasaran : Tersedianya Gedung Kesehatan Rumah sakit
Indikator : Peningkatan sarana pelayanan kesehatan
Target : 100%
Realisasi : 100%
- 26 Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana RS dan percetakan Rumah sakit
Indikator : Tersedianya barang/blanko cetak administrasi pelayanan
Target : 1 tahun
Realisasi : 1 tahun
- 27 Sasaran : Terpeliharanya gedung rumah sakit
Indikator : Terjaganya kebersihan gedung dan alat-alat yang memenuhi standar
Target : 14 jenis
Realisasi : 14 jenis
- 28 Sasaran : Terpeliharanya alat kesehatan rumah sakit
Indikator : Tersedianya alat kesehatan yang memenuhi standar
Target : 14 jenis
Realisasi : 14 jenis
- 29 Sasaran : Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit
Indikator : Tersedianya perlengkapan yang memenuhi standar
Target : 8 jenis
Realisasi : 8 jenis
- 30 Sasaran : Tersedianya dokumen perjanjian kerjasama
Indikator : Terlaksananya perjanjian kerjasama yang lebih baik
Target : 60 dokumen
Realisasi : 49 dokumen



III. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tinjauan terhadap formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang telah diuraikan di atas, maka dapat diinterpretasikan keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan RSUD Provinsi NTB serta perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi serta misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategik.

Analisis secara komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan RSUD Provinsi NTB pada Tahun 2011 berhasil, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang merupakan hambatan. Kondisi ini dapat dilihat dari persentase realisasi keuangan dari masing-masing kegiatan yang rata-rata mencapai 95,23 % dari fisik 95,23% dari realisasi pendapatan.

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan RSUD Provinsi NTB, antara lain disebabkan oleh:

1. Merupakan Rumah Sakit Swadana
2. Kegiatan dan program yang dilaksanakan pada umumnya merupakan kegiatan rutin untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien
3. Adanya system perencanaan yang bersifat *bottom-up*, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagian sudah sesuai dengan kebutuhan unit-unit kerja
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
5. Adanya dukungan dari masing-masing unit

Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan RSUD Provinsi NTB, antar lain disebabkan oleh :

1. Sebagian besar biaya operasional bersumber dari pendapatan fungsional Rumah Sakit (Swadana), sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasi dengan optimal karena sampai dengan batas waktu untuk pelaksanaan pengadaan, pendapatan Rumah Sakit belum sesuai target yang direncanakan.
2. Beberapa kegiatan/kebutuhan RS tidak dapat diperkirakan/diprediksi secara nyata, karena bersifat emergensi.
3. Terjadinya musibah kebakaran pada tanggal 10 juli 2011 yang mengakibatkan terbakarnya 18 ruang poli, 5 instalasi dan alat alat kesehatan dan alat kedokteran lainnya sehingga Rumah sakit tidak dapat beroperasi secara maksimal.



IV. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Program kegiatan RSUP Provinsi NTB pada tahun 2011 dibiayai dengan sumber dana sebagai berikut:

No	Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	APBD-Subsidi (Belanja Tidak Langsung)	47.217.220.769	44.615.386.484
2.	APBD-Subsidi (Belanja Langsung)	47.208.679.000	46.078.992.338
3.	APBD-Swadana (Belanja Tidak Langsung)	13.230.523.000	13.132.904.261.
4	APBD-Swadana (Belanja Langsung)	34.735.306.000	32.911.237.654,27
	Jumlah	142.391.728.769	136.738.520.737,27

Untuk lebih jelasnya, akan kami uraikan alokasi dan realisasi per jenis kegiatan sebagai berikut:

2. Dana Subsidi Belanja Tidak Langsung dengan kegiatan:

- a. Gaji dan Tunjangan Pegawai
- b. Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil
- c. Biaya jasa pelayanan kesehatan

Pagu Anggaran : Rp 60.447.743.769
Realisasi Anggaran : Rp 57.748.290.745 (95,53%)

3. Dana Subsidi belanja langsung dengan kegiatan:

- 3.1. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 3.2. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
- 3.3. Peningkatan kesehatan masyarakat
- 3.4. Pembangunan Rumah Sakit

Pagu Anggaran : Rp 47.208.679.000
Realisasi Anggaran : Rp 46,078,992,338 (97,61%)

4. Dana Swadana belanja langsung dengan kegiatan:

- 4.1. Penyediaan jasa surat menyurat
- 4.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya dan listrik
- 4.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 4.4. Penyediaan alat tulis kantor
- 4.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 4.6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 4.7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 4.8. Penyediaan makanan dan minuman
- 4.9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 4.10. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
- 4.11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- 4.12. Penyediaan alat listrik dan elektronik
- 4.13. Penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran
- 4.14. Penyediaan jasa pengisian tabung gas
- 4.15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rumah Sakit
- 4.16. Pendidikan dan pelatihan formal
- 4.17. Pembinaan mental dan fisik aparatur



- 4.18. Peningkatan iman dan takwa aparatur
- 4.19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 4.20. Penyusunan laporan keuangan semesteran
- 4.21. Penyusunan laporan keuangan ahir tahun
- 4.22. Penyusunan RKA dan DPA
- 4.23. Penyusunan RKPD dan Renja SKPD
- 4.24. Peningkatan kesehatan masyarakat
- 4.25. Pembangunan rumah sakit
- 4.26. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
- 4.27. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit
- 4.28. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit
- 4.29. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit
- 4.30. Penyusunan naskah kerjasama

Target Pendapatan : Rp.52.631.579.000
Realisasi Pendapatan : Rp 52.027.661.438,87 (98,85%)

Realisasi Pendapatan : Rp 52.027.661.438,87
Realisasi Pengeluaran : Rp 44.899.303.380 (86,29%)

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	APBD – Subsidi			
1.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	0,00
2.	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	150.767.375	149.902.000	99,43
3.	Peningkatan kesehatan masyarakat	6.803.910.000	6.727.523.138	98,88
4.	Pembangunan Rumah Sakit	40.254.001.625	39.201.567.200	97,39
II	APBD – Pendapatan Fungsional			
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	92.432.000	88.778.616	96,05
2.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya dan listrik	1.500.000.000	1,374,692,527	91,65
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	159.885.000	112.917.000	70,62
4.	Penyediaan alat tulis kantor	159.298.025	159.252.975	99,97
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	75.000.000	72.996.800	97,33
6.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	297.890.000	125.844.000	42,25
7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.460.000	10.840.000	70,12
8.	Penyediaan makanan dan minuman	319.143.500	273.666.759	85,75
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	220.000.000	208.433.500	94,74
10.	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	1.155.860.000	991.743.500	85,80
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	220.000.000	208.208.500	94,64



No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
12.	Penyediaan alat listrik dan elektronik	66.595.000	61.587.500	92,48
13.	Penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran	11.219.000	-	-
14.	Penyediaan jasa pengisian tabung gas	106.811.000	61.467.000	57,55
15.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	242.500.000	211.743.710	87,32
16.	Pendidikan dan pelatihan formal	261.782.500	177.350.000	67,75
17.	Pembinaan mental dan fisik aparatur	7.500.000	4.400.000	58,67
18.	Peningkatan iman dan takwa aparatur	2.400.000	1.200.000	50,00
19.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	38.556.500	34.594.700	89,72
20.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	5.506.200	5.506.200	100,00
21.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	97.391.700	94.387.200	96,92
22.	Penyusunan RKA dan DPA	24.000.000	12.000.000	50,00
23.	Penyusunan RKPD/Renja SKPD	11.405.000	10.374.500	90,96
24.	Peningkatan kesehatan masyarakat	27.769.850.325	27.025.469.262,27	97,56
25.	Pembangunan Rumah Sakit	69.000.000	64.244.000	93,11
26.	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	25.750.000	17.212.500	66,84
27.	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit	1.268.540.250	1.153.690.905	90,95
28.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit	140.250.000	79.980.500	57,03
29.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit	244.500.000	78.705.000	32,19
30.	Penyusunan naskah kerjasama	27.780.000	24.000.000	86,39



BAB IV PENUTUP

Dari data Rencana Strategis dan Data Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program pengembangan dan kebijakan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hakekatnya merupakan investasi pembangunan manusia yang berkesinambungan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas program yang tertuang dalam Rencana Strategik
3. Secara komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan RSU Provinsi NTB tahun 2011 dapat dinyatakan berhasil, yang diukur melalui Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
4. Tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja pada Rencana Strategik pada tahun 2011 adalah 98,85% dan fisik 98,85% dari realisasi pendapatan dan rata-rata pencapaian realisasi kegiatan adalah 69,20%

Direktur RSU Provinsi NTB,

dr. H. MAWARDI HAMRY, MPPM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611106 199603 1 002